

PIYAGĚM TANJUNĚ : DINAMIKA SOSIAL POLITIK DAN EKONOMI MASYARAKAT ULUAN PALEMBANG ABAD KE-18

Mayang Indah¹ Fuji Astuti² Ardian Fahri³

Universitas Samudra

Email : mayangindah11@unsam.ac.id,

Universitas Samudra

Email : fujiastuti@unsam.ac.id,

Universitas Samudra

Email : ardianfahri@unsam.ac.id

Abstract *Tanjung Charter is one of the collections of the South Sumatra State Museum with inventory code 07.45. Found in the Ranau area, South Ogan Komering Ulu. The Tanjung Charter is a product of the Palembang Sultanate during the reign of Sultan Ahmad Najamudin (1758-1776). The Tanjung Charter is made of copper plates with dimensions of 34.6 cm long and 22 cm wide and 0.4 cm thick. The Tanjung Charter is written using Central Javanese script and Javanese which has been mixed with the local Palembang language. The uniqueness of the Tanjung Charter contains the dynamics of the Socio-Economic and Politic life of the Uluan Palembang Community. On the other hand, the Uluan region has an important role in economic progress towards the Palembang Sultanate and Uluan as the hegemonic region of the Palembang Sultanate in the legal life system is subject to the rules of the Palembang Sultanate. This study uses a qualitative descriptive method and Critical Discourse Analysis (CDA) Approach to see the Socio-Economic and Politic dynamics of the Uluan Palembang community and has an important role in the collective network of Palembang and Javanese society. PiyagĚm Tanjung as the local wisdom of the Palembang community has implications in the academic field as a source of contextual local history learning by adding it as teaching material in fostering historical awareness in the field of literacy and knowledge of manuscripts in Palembang.*

Keywords: Tanjung Charter; Sultan Ahmad Najamudin; Javanese Language; Legal System

1. PENDAHULUAN

Secara bentang geografis, Sungai Musi membelah Kota Palembang menjadi wilayah *Iliran* dan *Uluan*. Perbedaan wilayah ini berpengaruh pada aspek kehidupan sosial dan kultural Masyarakat Palembang. Daerah *iliran* merupakan kawasan perdagangan yang berada dekat dari pusat pemerintahan sedangkan wilayah *uluhan* berada di kawasan pedalaman. Sehingga kedua daerah memiliki karakteristik yang berbeda, *iliran* identik dengan masyarakat egalitarian dan kosmopolitan, sedangkan masyarakat *uluhan* masih tradisional dan terbelakang (Irwanto dkk, 2010). Sungai Musi membentuk jaringan jalan-jalan air sebagai sarana penghubung dan mengikat di wilayah Kesultanan Palembang. Jejaring Sungai tidak hanya sebagai sumber kehidupan namun juga sebagai penghubung antara

wilayah *hiliran* dan *huluan* yang secara teratur dan terarah. Jejaring sungai menjadi daya tarik bagi dunia luar untuk melakukan transaksi perdagangan di wilayah Palembang (Pemprov Sumsel: 1986).

Sementara itu kehidupan ekonomi masyarakat *uluan* masih cenderung tradisional yaitu berladang, mencari ikan serta mengumpulkan hasil-hasil komoditas hutan seperti : Damar, rotan, kapas, lada, madu/lilin dan margasatwa gading dan lain-lainnya. Hasil Bumi yang dihasilkan ini kemudian di bawa ke wilayah kota untuk dijadikan komoditas dagang melalui jejaring sungai musu yang menghubungkan wilayah *uluan* dan *iliran* (Apriana & Heryati: 2021)

Setelah kerajaan Sriwijaya runtuh pada abad ke-13 M, Palembang mengalami transisi kekuasaan yang bercorak islam dengan berdirinya Kesultanan Palembang. Ki Gede Ing Suro mendirikan Kesultanan Palembang. Pendiri Kesultanan Palembang memiliki asal dari Jawa yakni Kerajaan Demak. Sehingga karakteristik Keraton Kesultanan Palembang memiliki kemiripan dengan Kesultanan yang ada di Jawa. Selain itu wilayah Sumatra yang lain juga berdiri Kerajaan bercorak Islam yaitu Kerajaan di Aceh, ketika Merah Silu mengubah Kerajaan Samudra menjadi Kesultanan Samudra yang kemudian berkembang menjadi Kesultanan Samudra Pasai. Hal ini juga menandai berakhirnya corak kerajaan Hindu Buddha di Nusantara (Aly : 1986).

Secara politis Kota Palembang memiliki pengaruh signifikasi dalam mengatur sistem pemerintahan. Disisi lain juga merupakan pusat perdagangan dunia. Dimana banyak pedagang-pedagang asing juga ikut melakukan transaksi dagang seperti pedagang Arab, Eropa dan Cina. Hasil komoditas dagang kemudian dibawa kembali ke seberang seperti : Batavia, Surabaya, Semarang, Banten, Bugis, Banjarmasin dan daerah pesisir selatan selat Malaka, termasuk Singapura, Amerika dan Eropa. Sebaliknya komoditas yang dibawa oleh pedagang asing juga sangat dibutuhkan bagi Kesultanan Palembang dan masyarakatnya yaitu kain, besi dan makanan kaleng dan lainnya. Disisi lain posisi Kota Palembang menunjukkan posisi central sebagai bandar perdagangan besar di bawah Kesultanan Palembang yang berperan dalam mengatur sistem harga dagang (Irwanto dkk: 2010).

Kesultanan Palembang dalam pemakaian bahasa sehari-hari menggunakan bahasa resmi yaitu bahasa Jawa Tengahan *Kromo Inggil* di dalam lingkungan keraton. Namun untuk masyarakat umum lainnya menggunakan bahasa *local*. Kesultanan Palembang memiliki keterikatan dengan kebudayaan Jawa sehingga memberi dampak bagi kehidupan masyarakat Palembang. Keraton menggunakan bahasa Jawa *Kromo Inggil* khususnya saat menghadap Sang raja. Tidak hanya itu bahasa Jawa juga digunakan sebagai bahasa diplomatik. Hal ini banyak terlihat dari PiyagĚm atau naskah yang diserahkan kepada Kepala Adat di wilayah pedalaman Palembang (Peeters: 1997) . Salah satu PiyagĚm yang menggunakan aksara Jawa dan berbahasa *Kromo Inggil* yang telah bercampur dengan bahasa *Local* ialah PiyagĚm Tanjun , yang ditemukan di Desa Sukabumi, Kecamatan Banding Agung, Ogan Komering Ulu. Daerah ini disebut daerah Ranau. Semula PiyagĚm Tanjun dimiliki oleh Hanafi Gelar Dalom, salah seorang ahli waris dari pemilik sebelumnya dan disimpan di rumahnya (Rapanie & Alam, 1993).

Penelitian ini menggunakan PiyagĚm Tanjun sebagai sumber teks tertulis yang menggunakan aksara Jawa, berbahasa *Kromo Inggil* dan bercampur dengan bahasa lokal Palembang. Menurut Fairclough melalui CDA (*Critical Discourse Analisis*) bahwa teks mengandung wacana yang dalam pengertiannya lebih luas, wacana yang dibangun ialah

hegemoni Kesultanan Palembang terhadap masyarakat uluan Palembang (Indah et al., 2017). Disisi lain penggunaan bahasa Jawa dalam lingkungan Keraton menunjukkan adanya jejaring Palembang-Jawa.

Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis isi teks Piyagëm Tanjung yang memuat dinamika sosial, politik dan ekonomi di Palembang pada Abad ke -18 M. Disisi lain teks Piyagëm Tanjung menunjukkan adanya jejaring Palembang-Jawa yang termuat dalam isi teks dengan menggunakan Bahasa kromo Inggil dan aksara Jawa. Serta bagaimana relasi kuasa yang terbangun dalam isi naskah yang memuat aturan-aturan dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi Masyarakat Palembang di bawah Kesultanan Palembang pada aba eke 18 M.

METODE

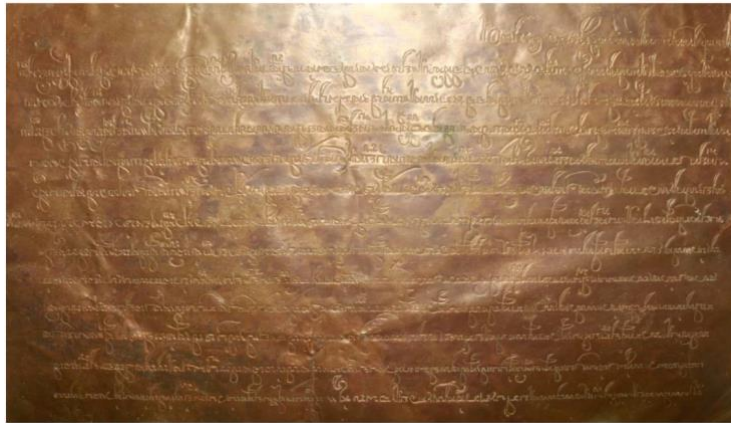
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dan juga menggunakan pendekatan CDA (*Critical Discourse Analyzis*) dalam menganalisis isi teks Piyagëm Tanjung dengan unit analisis Piyagëm Tanjung dengan kode inventaris 07.45 yang tersimpan di Museum Negeri Sumatra Selatan. Sebelumnya naskah ini ditemukan milik warga desa Sukabumi, Kec. Banding Agung, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan atau lebih dikenal sebagai daerah Ranau. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mendeskripsikan dan mendokumentasikan hasil studi pustaka yang digunakan penulis untuk mendapatkan informasi mengenai isi teks yang termuat dalam Piyagëm Tanjung. Adapun data yang didapat penulis mengenai kodeks dan isi teks Piyagëm Tanjung berasal dari tulisan yang dibuat oleh Ahmad Rapanie Igama (Aksara Balaputradewa : 1993).

Peneliti juga melakukan wawancara terbuka melalui pertanyaan terstruktur kepada pengiat naskah atau manuskrip yang ada di Palembang. Dalam hal ini peneliti menggunakan media whatsapp langsung kepada Dr. Wahyu Rizki Andhifani, S.S., M.M yang merupakan arkeolog Museum Palembang dan pengiat naskah-naskah Palembang. Bentuk wawancara yang digunakan semi terstruktur, agar peneliti dapat mengeksplorasi secara fleksibel untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan Piyagëm Tanjung dan dapat menganalisis bagaimana dinamika sosial, ekonomi dan politik Masyarakat Palembang abad ke-18.

Hasil dan Pembahasan

Piyagëm Tanjung merupakan naskah produksi Kesultanan Palembang sekitar tahun 1764 M pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Najamudin. Piyagëm ini tersimpan di museum Negeri Sumatera Selatan dengan kode inventaris 07.45. Piyagëm Tanjung terbuat dari Lempengan tembaga dengan ukuran panjang 34,6 cm, lebar 22 cm dan tebal 0,4 cm. Semula Piyagëm Tanjung dimiliki oleh Hanafi Gelar Dalom, yang merupakan ahli waris dari pemilik sebelumnya dan disimpan di rumahnya di Desa Sukabumi, Kecamatan Banding Agung, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan yang dikenal dengan sebutan daerah Ranau (Rapanie & Alam : 1993). Sebelumnya Piyagëm Tanjung bernama Piyagëm Sukabumi karena ditemukan di Desa Sukabumi, kemudian setelah berpindah Kelola oleh Museum Piyagëm ini dinamakan Piyagëm Padang Ratu karena Piyagëm ini terakhir berada di Desa Padang Ratu,

namun dalam isi PiyagĚm memuat Desa Tanjung maka penamaan PiyagĚm ini disebut juga PiyagĚm Tanjung (Wawancara Dr Wahyu Afandhi, S.S, M.M).



PiyagĚm Tanjung Kode Inventaris 07.45

Koleksi Museum Nasional Sumatera Selatan

Tabel 1. Teks Naskah PiyagĚm Tanjung kode inventaris 07.45

Baris	Isi Teks
Baris Pertama	<i>Surat PiyagĚm dari kanjeng Sultan diberikan kepada Pangeran Mangku Hanom di Desa Tanjung. Adapun sabda beliau bila ada orang Palembang berhutang-piutang dan orang desa berhutang pada</i>
Baris Kedua	<i>Sesama orang desa serta diketahui Prawitannya (penghulu adat), Prawitan itu kuasa untuk mengaturnya, jika orang tidak menyahur (membayar) maka (hutang) dihitung (tiap sepuluh) menjadi tiga belas hingga tiga kali, naik menjadi</i>
Baris Ketiga	<i>Berlipat, tetapi tidak boleh dinaikkan lagi dan tidak boleh menarik kepadanya seenak hatinya sendiri, hal ini serahkan pada Prawitan untuk mengurusnya. Adapun perkara</i>
Baris Keempat	<i>Hutang karena perjudian dan sabung ayam, mereka tidak boleh ditagih dan tidak boleh bertengkar atau bunuh membunuh; tentang hal itu supaya bermusyawarah dengan Prawitan. Adapun mengenai pembuatan</i>
Baris Kelima	<i>Kebun Sahang (lada, merica), barang siapa tidak mau membuat kebun sahang oleh Prawitannya akan (ditangkap dan) diserahkan ke Palembang. Jika ada orang berdagang atau orang desa berdagang.</i>
Baris Keenam	<i>Orang, tidak boleh menentang larangan Dalem (Sultan). Jika ada orang yang mendatangi rumah orang atau desa orang lain sedang orang yang didatangi itu terluka (maka orang yang mendatangi itu) dikenai biaya pengobatan</i>
Baris Ketujuh	<i>Tetapi, (jika orang yang didatangi itu) mati , maka ia dikenal wanuk (nama jenis hukuman, hutang darah bayar darah); jika orang yang mendatangi itu luka atau mati maka tidak ada urusannya lagi. Jika orang dagang mondok (numpang) dirumah orang desa atau membawa.</i>

Baris Kedelapan	<i>Rumah, itu tidak boleh, jika ia melanggar akan didenda oleh Dalem. Dan tidak boleh orang desa bersuami istri dengan orang Palembang, jika dilanggarnya ia akan dihukum.</i>
Baris Kesembilan	<i>Dan apabila ada pertengkaran di antara orang peranakan sedangkan mereka minta peraturan (ietertiban) kemudia dimusyawarahkan dengan Prawitan semarga tetapi kemudian lari mengungsi, mereka itu dikenai hukuman.</i>
Baris Kesepuluh	<i>Dan apabila ada orang mencuri (maling) lalu terjadi pertengkaran, jika orang yang disangka mencuri (maling) itu kalah maka denda/hukumannya menjadi berlipat sebaliknya apabila yang mendakwa itu kalah makai a harus membayar sebesar nilai yang didakwarkannya. Apabila menangkap orang minggat (meninggalkan tempat tanpa izin)</i>
Baris Kesebelas	<i>Padahal ada barang barwaanya mencapai nilai sepuluh reyal, barang itu menjadi rampasan, apabila nilainya lebih dari sepuluh reyal maka hanya nilai balasannya (angka kecil di atas sepuluh yang menjadi haknya. Apabila orang desa</i>
Baris Keduabelas	<i>Mengamuk pada pegawai Dalem, ia akan dihukum; jika yang mengamuk itu budak dari orang luar maka hukumannya berlipat. Hendaknya semua yang ada dibawah kekuasaan (Sultan) supaya percaya kepada Prawitan setia yang telah ditunjuk oleh Kanjeng Sultan.</i>
Baris Ketigabelas	<i>(Peraturan ini) ditetapkan (diberlakukan) pada waktu bulan Windu 1690-1764 Masehi.</i>

Sumber : Teks Piyagëm Tanjun kode inventaris 07.45

(Aksara Balaputradewa: 1993)

Piyagëm Tanjun memiliki jumlah baris sebanyak tiga belas baris. Menggunakan aksara dan bahasa Jawa Tengahan. Piyagëm Tanjun memuat seperangkat aturan hukum yang dibuat oleh Kesultanan Palembang untuk wilayah pedalaman desa Ranau Muara Dua, yang merupakan wilayah *uluan* Palembang (Aksara Balaputradewa: 1993).

Dinamika Sosial Politik : Hegemoni Kesultanan Palembang terhadap masyarakat *Uluhan* Abad Ke-18

Menurut Sartono Kartodirdjo dalam Sari dkk (2021) Masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelas yakni (1) Berdasarkan Ekonomi (2) Kedudukan dalam struktur pemerintahan , dan (3) Rakyat biasa yang menduduki tingkatan paling akhir. Palembang secara bentang georgafis dibedakan menjadi dua wilayah yaitu wilayah *huluan* dan wilayah *iliran* Perbedaan bentang geografis ini mempengaruhi Struktur sosial dalam Masyarakat Palembang. Stuktur sosial Masyarakat *iliran* terdiri dari (1) *sultan*, (2) *bangsawan*, dan (3) *rakyat biasa*. Wilayah pemerintahan ibukota (*iliran*) berada langsung di bawah kepemimpinan sultan. Sedangkan wilayah pedalaman (*dusun*) di bawah kepemimpinan pegawai kesultanan. Struktur sosial Masyarakat pedalaman terdiri dari (1) *jenang* atau *raban*, (2) *kepala marga*, dan (3) *Masyarakat biasa* (Irwanto dkk: 2010).

Menurut Louise Marlow dalam (Kozok, 2024) Islam yang berkembang di Nusantara berasal dari daerah Arab dan Persia. Sehingga memiliki sifat yang egaliter. Hal ini menjadikan islam lebih mudah diterima dalam kehidupan Masyarakat yang sebelumnya menganut agama Hindu-Budha. Disisi lain sifat egaliter ini tidak bertahan lama. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi Kesultanan yang telah mapan. Sehingga mempengaruhi pandangan yang menempatkan Raja atau Sultan menduduki Piramida Sosial tertinggi sebagai naungan Allah di muka bumi. Posisi ini dikaitkan pada kedudukan atau wewenang dari Sultan itu sendiri yang memiliki pengaruh dan dianggap setara dengan tingkatan nabi sebagai penerus atau panjangan tangan dari Allah. Hal ini ditunjukkan dalam naskah PiyagĚm Tanjun pada baris keenam "*orang, tidak boleh menentang larangan dalem (sultan)*". Sehingga diyakini Sultan merupakan sosok yang memiliki banyak kelebihan dan kepandaian (Nawiyanto & Endrayadi, 2016).

Dalam (Setyawati et al: 2021) terdapat golongan bangsawan yang merupakan keturunan Raja dan kaum ningrat. Adapun Gelar yang digunakan ialah Pangeran, Raden, Masagus, Kiagus dan Kemas (Kiai Mas). Sedangkan untuk Perempuan diberikan gelar Raden Ayu, Masayu, Nyimas dan Nyayu. Selanjutnya ada rakyat jelata yang tidak memiliki gelar kebangsawanan, rakyat jelata umumnya mereka yang bekerja di kebun, Bertani dan berdagang. Kemudian terdapat juga golongan budak, disini para budak lebih dimaksudkan kepada orang-orang yang telah kehilangan kemerdekaan atau orang yang menjadikan dirinya sebagai tawanan orang lain. Yakni mereka memiliki keterikatan tertentu dengan orang lain. Sevenhoven (1915) melukiskan bahwa Golongan budak juga kerap dikatakan sebagai golongan yang rendah dan yang paling sengsara hidupnya. Budak ini juga merupakan layaknya barang dagangan, bahkan sempat dijadikan sebagai perdagangan lainnya (Nawiyanto & Endrayadi, 2016).

Meskipun memiliki Perbedaan karakteristik kedua wilayah ini saling berkaitan satu sama lain. Hubungan antara *iliran* dan *uluan* diperantarai oleh *Jenang* sebagai pegawai sultan di daerah *uluan*. Selain itu wilayah *uluan* melakukan upacara milir sebah setiap menjelang bulan Ramadhan sebagai ucapan terima kasih atas perlindungan yang telah diberikan oleh Kesultanan Palembang terhadap wilayah *uluan*. Bisanya masyarakat *uluan* membawa hasil sumber daya alam hasil pertanian dan Perkebunan (Sevenhoven: 2015).

PiyagĚm Tanjun memiliki kedudukan sebagai kontrol sosial Masyarakat *uluan*, sebagai pedoman dalam pelaksanaan aturan hukum social dan ekonomi. Disisi lain kehadiran PiyagĚm Tanjun ini menunjukkan hegemoni Kesultanan Palembang terhadap wilayah uluan. Kepala marga sebagai kontrol pelaksanaan aturan hukum perwakilan dari Kesultanan Palembang yang termuat dalam PiyagĚm Tanjun .

Dinamika Ekonomi: Hutang Piutang dan Kewajiban Menanam Sahang (Lada)

Posisi Kesultanan Palembang yang berada di wilayah *iliran* Sungai Musi, menjadikannya simpul penting dalam jaringan perdagangan regional dan internasional. Kegiatan perdagangan yang berlangsung di Pelabuhan-pelabuhan Palembang mempertemukan berbagai bangsa seperti Arab, Cina, India dan Eropa. Tidak hanya itu Kesultanan Palembang memiliki peran penting dalam pembentukan identitas sosial, politik dan ekonomi masyarakat Melayu. Keberadaan kesultanan Palembang tidak hanya mencerminkan kebesaran politik lokal, tetapi juga menampilkan karakter budaya yang khas, termasuk dalam praktik ekonominya. Sistem ekonomi yang tumbuh dalam kehidupan

masyarakat Palembang tidaklah berdiri sendiri melainkan berakar pada nilai-nilai Islam dan adat Melayu yang saling berkaitan satu sama lain (Azumardi: 2017).

Hal ini juga sejalan dengan Leonard dalam (Husni, 2025) dalam aktivitas perdagangan tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga berimplikasi pada transformasi budaya dan sistem nilai masyarakat setempat. Model ekonomi yang berkembang menunjukkan sifat yang adaptif, di mana unsur lokal dan global saling mempengaruhi dalam kerangka nilai-nilai Islam dan adat. Adat Melayu juga memainkan peran krusial dalam aturan ekonomi. Hukum adat mengatur kepemilikan lahan, tata niaga, serta penyelesaian sengketa. Nilai-nilai kebersamaan dan kesepakatan komunitas menguatkan intergitas system tersebut. Dalam Masyarakat Palembang, system ekonomi tidak terlepas dari struktur sosial yang bersifat kolektif dan hirarkis, di mana peran sultan, ulama dan pemuka adat saling bersinergi membentuk tatanan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan (Ichawan dalam Husni : 2025).

Hal ini sejalan dengan isi teks dalam Piyagēm Tanjung yang menggambarkan aturan hukum terkait dengan ekonomi dalam baris ke-1 hingga baris ke-4 yang memuat aturan hukum piutang.

Baris 1 *"bila ada orang Palembang berhutang-piutang dan orang desa berhutang pada"*

Baris 2 *"Sesama orang desa serta diketahui Prawitannya (penghulu adat), Prawitan itu kuasa untuk mengaturnya, jika orang tidak menyahur (membayar) maka (hutang) dihitung (tiap sepuluh) menjadi tiga belas hingga tiga kali, naik menjadi"*

Baris 3 *"Berlipat, tetapi tidak boleh dinaikkan lagi dan tidak boleh menarik kepadanya seenak hatinya sendiri, hal ini serahkan pada Prawitan untuk mengurusnya. Adapun perkara"*

Baris 4 *"Hutang karena perjudian dan sabung ayam, mereka tidak boleh ditagih dan tidak boleh bertengkar atau bunuh membunuh; tentang hal itu supaya bermusyawarah dengan Prawitan. Adapun dengan pembuatan"*

Aturan-aturan hukum terkait hutang piutang diatur jelas dalam baris-baris Piyagēm Tanjung, dimana *Prawitan* merupakan kepala adat (penghulu adat) yang memiliki kuasa dalam mengatur hutang piutang. Dalam baris ke-2 disebutkan bahwa jika orang tidak membayar hutang maka hutangnya setiap 10 bertambah menjadi 13 : *"Jika si A berhutang 10 riyal, maka kewajibannya membayar sebesar 13 riyal. Namun jika Si A tidak membayar hutang pada batas waktu yang telah ditentukan, maka kewajiban bagi penghutang yakni membayar 3 kali lipat menjadi 39 riyal"*. Aturan hutang piutang ini tidak boleh dinaikkan lagi seenak hati orang yang memberi hutang (Rapanie & Alam: 1993).

Dalam hal ini menunjukkan kehidupan masyarakat Palembang hidup dalam struktur sosial yang hirarkis namun integratif, di mana sultan berperan sebagai kepala pemerintahan sekaligus pemimpin spiritual. Struktur ini memberikan dasar legitimasi bagi kebijakan ekonomi yang dilandaskan pada nilai-nilai Islam dan adat istiadat setempat (Taufik: 1991). Disisi lain Masyarakat Palembang mengadopsi system ekonomi berdasarkan syariat islam dan hukum adat. Misalnya, dalam jual beli, selain akad yang sah, terdapat pula prinsip saling percaya dan pantang menipu yang menjadi bagian dari etika dagang Melayu (Kernas dalam Husni : 2025).

Sebagai pusat perdagangan Palembang memiliki komoditas unggulan seperti lada, emas, rotan dan kayu gaharu. Menurut Hanafiah dua komoditas yang diperlukan oleh dunia perdagangan internasional adalah lada dan timah. Kedua komidtas ini merupakan

primadona bagi Kesultanan Palembang Darusalam. Hal ini dapat dilihat bagaimana Kesultanan Palembang mengatur produksi Lada (sahang) dalam Piyagêm Tanjung memuat aturan kewajiban menanam sahang (lada) termuat dalam baris kelima “*Kebun Sahang (lada, merica), barang siapa tidak mau membuat kebun sahang oleh Prawitannya akan (ditangkap dan) diserahkan ke Palembang*”. Aturan yang dibuat oleh Kesultanan Palembang bagi Masyarakat huluan menunjukkan bagaimana kedudukan komoditas lada sebagai komoditas ekspor utama yang sangat ditekankan sebagai komoditas wajib untuk ditanam. Dalam Andhifani (2025) Kewajiban menanam lada merupakan kewajiban kolektif yang telah diatur oleh Kesultanan Palembang melalui . Prawitan memiliki peran startegis dalam melaksanakan kebijakan menanam lada. Disisi lain ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap aturan kolektif dan adat. Sehingga penyelesaiannya melalui otoritas tinggi yakni pemerintahan pusat di Palembang. Selain Lada, komoditas eskpor terbesar yaitu timah yang berada di Pulau Bangka yang menjadi pusat industri timah awal di Palembang dan sebagai sumber pemasok keuangan terbesar bagi Kesultanan Palembang.

KESIMPULAN

Palembang merupakan wilayah yang strategis dalam simpul perdagangan di Nusantara. Di mana wilayah ini menjadi muara bertemunya pedagang lokal dan juga pedagang asing dari Arab, China, India dan Eropa. Sehingga menjadikan wilayah Palembang pusat pertemuan dan central ekonomi pada masa Kesultanan Palembang. Sebagai kerajaan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam menjadikan sistem ekonomi dan kehidupan masyarakat juga berasaskan nilai-nilai Islam dan menjunjung adat istiadat.

Keberagaman Kota Palembang juga tergambar dalam banyak naskah-naskah di wilayah Palembang, salah satunya yang terdapat di pedalaman Sumatera yang menunjukkan adanya penggunaan Bahasa Kromo Inggil dalam teks naskah dan juga memuat fenomena hegemoni kesultanan Palembang terhadap wilayah *huluan*. Salah satunya yaitu Piyagêm Tanjung yang ditemukan di wilayah Desa Ranau, Ogan Komering Ulu. Piyagêm Tanjung memuat aturan hukum sosial, ekonomi dan politik dimana berasaskan nilai-nilai Islam dan adat. Dalam kehidupan sosial dan politik Raja/Sultan memiliki kedudukan tertinggi dalam stuktur pemerintahan dan terdapat tingkatan sosial seperti golongan bangsawan keraton, dan rakyat biasa. Disisi lain Wilayah pedalaman Sumatera akan dikontrol oleh perwakilan Sultan seperti kepala marga atau prawitan dalam fungsi pengawasan Masyarakat dalam menjalankan aturan-aturan Sultan. Dalam Ekonomi Aturan-aturan dalam Piyagêm memuat kewajiban bagi rakyat untuk menanam lada (sahang) serta adanya aturan dalam hutang piutang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bagaimana Piyagêm- Piyagêm menunjukkan adanya sistem kendali sosial, ekonomi dan politik yang mengikat Masyarakat untuk menjaga keteraturan dan kepatuhan Masyarakat dalam berkehidupan. Disisi lain Piyagêm ini juga menunjukkan bagaimana loyalitas rakyat terhadap sistem pemerintahan dan hukum yang berlaku. Hal ini juga sejalan dengan disertasi Dr. Wahyu Rizky Andhifani, M.M berjudul “Relasi Kuasa Dan Konstruksi Identitas Kesultanan Palembang Darussalam Berdasarkan Piyaêm Abad XVII—XIX” Dalam Foucault (1995) Kesultanan Palembang mampu membangun masyarakat yang tunduk melalui pembuatan mekanisme control yang tersebar dalam Piyagêm yang membuat Masyarakat merasa terawasi dan terikat pada sistem tanpa harus melakukan pengawasan fisik yang ketat. Sehingga menciptakan kehidupan sosial, ekonomi dan politik yang stabil dalam pemerintahan Kesultanan Palembang. Kehadiran

Piyagêm ini juga memberikan kontribusi bagi perkembangan Sejarah Lokal di Palembang sebagai bukti bahwa literasi berkembang di wilayah Palembang dan juga dapat dijadikan sebagai sumber bahan ajar serta sarana untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya mengenai naskah-naskah Palembang pada masa Kesultanan Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. 1991. *Adat dan Islam: Dalam Sejarah Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Andhifani, Wahyu Rizky. 2025. *Disertasi : Relasi Kuasa Dan Konstruksi Identitas Kesultanan Palembang Darussalam Berdasarkan Piyaêm Abad XVII—XIX*. Universitas Indonesia: Depok.
- Arviansyah, M. R. (2021). Struktur Sosial dan Pemerintahan Pada Masa Kesultanan Palembang Darussalam. *SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah*, 3(2), 122-131.
- Apriana, A & Heryati, H. 2021. Perkonomian Masyarakat Sumatera Selatan Abad 15-18 M. *Danadyaksa Historica*, 1(1), 1-11.
- Azraa, A. 2017. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII: Akar Pembaharuan Islam Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Djohan Hanafiah. 1995. *Melayu Jawa: Citra Budaya & Sejarah Palembang*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Husni, M. (2025). KAJIAN HISTORIS MODEL EKONOMI MELAYU PADA MASYARAKAT KESULTANAN PALEMBANG. *Jurnal Iqtishaduna: Economic Doctrine*, 7, 25–33.
- Indah, M., Abidin, N. F., & Joebagio, H. (2017). Gelumpai Manuscript: Islamization and Development of Palembang Darussalam Sultanate (16th-17th century). *PROCEEDINGS ICTESS UNISRI 2017*, 1(1), 362–366.
- Kozok, U. (2024). Tanah Pertemuan Raja: Sejarah Pernaskahan Kerinci 1370-1819 M. *Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara*, 15(2), 219–256. <https://doi.org/10.37014/jumantara.v15i2.4838>
- Peeters, Jeroen. 1997. *Kaum Tuo-Kaum Mudo: Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*. Jakarta : INIS.
- Pemerintahan Provinsi Sumatra Selatan. 1986. *Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badruddin II : Pahlawan Kemerdekaan Nasional*. Palembang: Pemerintahan Provinsi Sumatra Selatan.
- Rapanie & Alam. 1993. *Piagam Padang Ratu dari Kesultanan Palembang*. Aksara Balaputradewa. No 2 (11-15).
- Santun, D. I. M., Murni, & Supriyanto. (2010). *Iliran dan Uluan: Dikotomi dan dinamika dalam sejarah kultural Palembang*. Yogyakarta: Eja Publisher

- Sari, L. F., Syawaludin, M., & Khudin, S. (2021). Dinamika Kelas Sosial Masyarakat Di Kesultanan Palembang Darussalam Pada Masa Transisi. *Tanjak: Sejarah Dan Peradaban Islam*, 1(1), 1-15.
- Setyawati, D., & Yuliarni, Y. (2021). Pelapisan Sosial Masyarakat Melayu-Jawa Pada Masa Kesultanan Palembang Abad 19. *HEURISTIK: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 1(2), 107-118.
- Sevenhoven, J.I. Van. 2015. Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang. Yogyakarta : Penerbit Ombak.

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s)

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

